

Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya

Intan Puspitasari¹, Diana Puspita Retno, Salsabilla Auliazaki A²
Tiara Nebrisca Valonika A³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

22041010137@student.upnjatim.ac.id¹

ABSTRACT

This research evaluates the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Morokrembangan Village, Krembangan District, Surabaya City. This research aims to assess the effectiveness, efficiency and impact of the program on the welfare of the poor in urban areas with high population density. Using qualitative methods with interviews and document analysis, the research results show that BPNT has helped increase food security and reduce the economic burden on beneficiaries, despite obstacles such as accessibility, sudden distribution and quality of goods. This research recommends increasing outreach, quality monitoring, more accurate data collection, and regular evaluation to increase program effectiveness. These findings are relevant for improving program implementation in the future, both at the local and national levels.

Keywords: Evaluation, Non-Cash Food Assistance, Poverty, Social Welfare, Morokrembangan Village, Surabaya.

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah urban dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan analisis dokumen, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPNT telah membantu meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi beban ekonomi penerima manfaat, meskipun terdapat kendala seperti aksesibilitas, distribusi mendadak, dan kualitas barang. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, pengawasan kualitas, pendataan yang lebih akurat, dan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas program. Temuan ini relevan untuk perbaikan implementasi program di masa mendatang, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kata Kunci: Evaluasi, Bantuan Pangan Non Tunai, Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial, Kelurahan Morokrembangan, Surabaya.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi masalah besar bagi pemerintah dan merupakan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Kemiskinan saat ini bukan masalah yang ada hanya di negara Indonesia saja. Setiap negara, baik negara berkembang atau negara maju pun, ingin membahas kemiskinan karena hal ini telah menjadi masalah secara global. Di Indonesia, tingkat persentase penduduk miskin mengalami penurunan yang signifikan tiap tahunnya. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di Indonesia adalah sebesar 9,36%, sedangkan di tahun 2024 persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,03% (BPS, 2024). Hal tersebut berarti bahwa persentase tingkat kemiskinan di Indonesia telah menurun sebesar 0,33% di tahun 2024. Walaupun demikian, tingkat kemiskinan ini masih

berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti tingginya angka pengangguran, tingginya tindakan kriminal, dll. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan segera dari pemerintah untuk mengentaskan masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis kemiskinan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold) (Teoretis et al., n.d.). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2002:4). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang dianggap miskin adalah masyarakat yang belum mampu dalam memenuhi kebutuhan primernya, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keamanan.

Mewujudkan masyarakat sejahtera yang adil dan makmur merupakan salah satu dari tujuan nasional, dan pencapaian tujuan ini dilakukan secara sistematis dan terpadu melalui penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan peristiwa dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, serta perbedaan yang signifikan antara kebutuhan manusia dan kemampuan mereka untuk memenuhi tuntutan hidup membuat ini tidak selaras dengan kemampuan manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Sehingga, hal ini menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat yang pada akhirnya menjadi penyebab utama dari kemiskinan. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memberikan program bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang bermaksud agar dapat menunjang kebutuhan hidup mereka.

Sangat penting bagi pemerintah untuk berpartisipasi secara aktif dalam memerangi kemiskinan melalui penerapan kebijakan yang dapat menghasilkan program dan kegiatan pembangunan yang terintegrasi, seperti Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Mengutip dari berita yang dimuat dalam media online sikapiuangmu.ojk.go.id, tentang Mengenal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Bantuan Sosial Non Tunai diberikan sebagai program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini bermaksud untuk mempermudah masyarakat dalam keuangan formal diperbankan. penyaluran Bantuan secara non tunai dinilai lebih efektif dan juga efisien. Masyarakat penerima Bantuan non tunai diberi kartu elektronik yang digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko (e-warong) sesuai dengan harga yang ditentukan. Dengan hal ini diharapkan masyarakat memperoleh nutrisi yang lebih seimbang. Pencairan dana bantuan non tunai bisa diatur sendiri oleh penerima bantuan tersebut, maka diharapkan masyarakat dapat membiasakan masyarakat untuk menabung. Untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai ini, diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).” Sumber: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10471> diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 jam 21.42)

Kelurahan Morokrembangan di Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, menjadi salah satu wilayah pelaksanaan program BPNT. Wilayah ini memiliki karakteristik urban yang kompleks dengan jumlah penduduk yang padat dan tingkat kesejahteraan yang bervariasi. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Surabaya, Kelurahan Morokrembangan termasuk dalam wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat program bantuan pangan non tunai yang cukup besar dibandingkan daerah-daerah lainnya yang ada di Surabaya, sehingga evaluasi terhadap pelaksanaan BPNT di kelurahan ini menjadi relevan. Meski demikian, keberhasilan pelaksanaan program ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang muncul di lapangan.

Beberapa kendala yang sering ditemukan dalam pelaksanaan BPNT meliputi keterbatasan aksesibilitas penerima manfaat ke kantor pos terutama bagi penerima manfaat yang sudah tua, penyebaran undangan yang mendadak sehingga penerima manfaat yang bekerja merasa kesulitan untuk meminta izin. Selain itu, kurangnya informasi terkait teknis pengambilan bantuan jika diwakilkan oleh keluarga atau orang lain serta kualitas barang yang kadang kurang bagus juga kerap menjadi kendala. Di sisi lain, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program seringkali belum dilakukan secara sistematis, sehingga sulit untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Morokrembangan, dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu efektivitas program dalam mencapai sasaran, efisiensi mekanisme pelaksanaan dan dampak yang dirasakan oleh penerima manfaat. Dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana program BPNT memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang.

Hasil dari penelitian ini tidak hanya relevan bagi pemerintah daerah Kota Surabaya dalam mengelola program BPNT di Kelurahan Morokrembangan, tetapi juga dapat menjadi bahan acuan bagi pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan kualitas program bantuan sosial secara nasional. Dengan demikian, program BPNT dapat terus ditingkatkan efektivitasnya dalam memenuhi tujuan utama, yaitu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga miskin dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif di mana peneliti akan memaparkan hasil analisis secara deskriptif. Menurut (Ramadhani, 2018) metode deskriptif menggunakan sasaran yang dapat diamati sebagaimana yang terlihat, terbaca, terdengar, penampakan tersebut sewajar mungkin dan informasinya dapat dicatat sesuai dengan sumber yang ada. Data untuk penelitian ini akan diperoleh melalui pengumpulan data literatur dan observasi secara langsung. Peneliti akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan penerima BPNT dan perangkat desa Morokrembangan. Selain itu, peneliti juga dapat memanfaatkan sumber lain, seperti

laporan hasil penelitian, buku referensi, serta dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kota Surabaya memegang peran penting dalam pelaksanaan BPNT. Dinas ini bertugas memberikan layanan sosial, rehabilitasi, dan perlindungan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (2008), Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang sosial serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Sedangkan, fungsi utama dinas sosial yang tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (2021), yaitu meliputi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam operasinya, dinas ini melibatkan berbagai Unit Penunjang Teknis Dinas (UPTD) seperti Liponsos Keputih untuk rehabilitasi PMKS dan Kampung Anak Negeri untuk pembinaan sosial. Dinas Sosial juga mengutamakan prinsip transparansi dan inklusivitas dalam pelayanan, termasuk kemitraan dengan berbagai lembaga.

Kelurahan Morokrembangan, yang terletak di Kecamatan Krembangan, Surabaya, menjadi lokasi dengan jumlah penerima manfaat BPNT terbesar di kota tersebut. Dengan jumlah penduduk sekitar 49.311 jiwa (BPS, 2020), kelurahan ini mencerminkan tantangan urban seperti kepadatan penduduk dan beragam tingkat kesejahteraan. Lokasi ini menjadi penting dalam evaluasi program karena kompleksitas sosial-ekonomi yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Bab ini membahas hasil penelitian terkait evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Analisis dilakukan berdasarkan teori evaluasi William N. Dunn, mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Fokus penelitian diarahkan untuk mengevaluasi sejauh mana program ini mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga miskin dan mendukung kesejahteraan sosial masyarakat.

1. Efektivitas

Efektivitas pelaksanaan BPNT di Kelurahan Morokrembangan diukur dari ketepatan sasaran penerima manfaat, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan pemantauan program. Penelitian menunjukkan bahwa program ini telah cukup efektif menjangkau keluarga miskin dan kelompok rentan lainnya. Hal ini tercermin

dari pernyataan penerima manfaat dan aparat kelurahan, yang menegaskan bahwa prioritas diberikan kepada lansia dan keluarga miskin.

a. **Ketepatan**

Sasaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BPNT berhasil menjangkau keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan. Proses pendataan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan RT/RW serta verifikasi langsung oleh aparat kelurahan. Hal ini memastikan bahwa penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Salah satu penerima manfaat, Ibu Kustini, menyatakan: *"Kalau bagi saya, program BPNT di sini sudah cukup tepat. Banyak penerima bantuan yang memang benar-benar membutuhkan, seperti keluarga miskin atau yang memiliki anggota rumah tangga lansia."* (Wawancara, 17 Desember 2024).

Aparat kelurahan juga mendukung pernyataan ini: *"Dalam proses verifikasi penerima, kami selalu melaksanakannya secara terbuka, melibatkan RT/RW, dan mendatangi rumah warga untuk memastikan bahwa keluarga tersebut memang layak menerima bantuan."* (Wawancara, 10 Desember 2024).

b. **Pencapaian Tujuan**

Tujuan utama BPNT untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga miskin dinilai tercapai, meskipun ada beberapa kendala teknis dalam implementasi. Penerima manfaat mengungkapkan bahwa bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan pokok.

c. **Sosialisasi Program**

Sosialisasi program dianggap cukup baik, meskipun beberapa penerima manfaat mengeluhkan kurangnya informasi terkait perubahan teknis, seperti lokasi atau jadwal distribusi bantuan.

2. Efisiensi

Efisiensi dievaluasi berdasarkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil optimal. Pelaksanaan BPNT di wilayah ini menunjukkan distribusi bantuan yang relatif lancar dengan penggunaan sumber daya yang tepat. Sistem penyaluran non-tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) memungkinkan penerima manfaat memperoleh bahan pangan pokok dengan lebih cepat dan transparan. Namun, masih ditemukan kendala teknis seperti aksesibilitas ke lokasi distribusi bantuan, terutama bagi lansia atau penerima manfaat dengan keterbatasan fisik, seperti yang diungkapkan oleh salah satu penerima manfaat:

"Kadang, mesin di e-Warong tidak berfungsi, jadi kami harus kembali di lain hari. Ini menyulitkan, terutama bagi lansia seperti saya." (Wawancara, 15 Desember 2024).

3. Kecukupan

Program BPNT dinilai cukup memadai dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok. Namun, jumlah bantuan yang diberikan terkadang dianggap belum sepenuhnya mencukupi untuk mengatasi kebutuhan rumah tangga secara keseluruhan. Dampak positif program ini tetap dirasakan oleh penerima

manfaat, terutama dalam hal ketersediaan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.

4. Perataan

Perataan distribusi menjadi aspek penting dalam pelaksanaan BPNT. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar penerima manfaat merasa distribusi bantuan telah dilakukan secara adil. Namun, beberapa tantangan seperti keluhan terkait kualitas bahan pangan yang diterima oleh kelompok tertentu menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan.

5. Responsivitas

BPNT di Kelurahan Morokrembangan dinilai cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Program ini dirancang dengan mempertimbangkan masukan dari penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, tingkat responsivitas masih dapat ditingkatkan, terutama dalam menangani masalah-masalah mendesak seperti penyesuaian jadwal distribusi bantuan untuk kelompok penerima yang bekerja. Salah satu penerima manfaat berkomentar:

"Kadang kami dapat undangan mendadak, jadi susah bagi yang kerja untuk izin. Kalau ada jadwal tetap setiap bulannya, akan lebih mudah untuk kami." (Wawancara, 14 Desember 2024).

6. Ketepatan

Ketepatan kebijakan BPNT mencerminkan kesesuaiannya dengan nilai sosial, budaya, dan regulasi lokal. Program ini telah diterima dengan baik oleh masyarakat, meskipun ada beberapa kritik terkait mekanisme penyaluran dan kualitas bahan pangan. Ketepatan pelaksanaan juga didukung oleh pendekatan yang berbasis data dan pengawasan yang lebih baik. Seorang aparat kelurahan menyatakan:

"Meskipun sebagian besar masyarakat menerima program ini dengan baik, kami tetap harus meningkatkan mekanisme pengawasan agar distribusi bantuan lebih terkontrol dan tepat sasaran." (Wawancara, 10 Desember 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Program BPNT menunjukkan efektivitas dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin, meskipun masih terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan.
2. Efisiensi program terlihat dari mekanisme distribusi yang memanfaatkan sistem non-tunai, namun membutuhkan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan kualitas barang dan kecepatan distribusi.
3. Kecukupan program dirasakan oleh sebagian besar penerima manfaat, tetapi ada kebutuhan peningkatan jumlah bantuan untuk menjawab seluruh kebutuhan rumah tangga miskin.
4. Program ini telah berupaya menerapkan asas keadilan dalam distribusi manfaat, namun perbaikan diperlukan untuk mengurangi disparitas di antara kelompok sasaran.

5. Responsivitas program cukup baik, meski diperlukan sosialisasi lebih intensif mengenai prosedur dan kebijakan terbaru.
6. Ketepatan pelaksanaan sudah sesuai dengan peraturan dan kebutuhan lokal, tetapi perlu penyesuaian lebih fleksibel terhadap dinamika masyarakat.

SARAN

Evaluasi pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Morokrembangan, Surabaya, dapat memberikan wawasan penting terkait efektivitas, efisiensi, dan dampak sosial dari program ini di tingkat lokal. Berdasarkan hasil penelitian yang mencakup wawancara dengan penerima manfaat, pendamping sosial, dan analisis data sekunder dari pemerintah setempat, ditemukan beberapa temuan dan saran yang relevan.

1. **Peningkatan Sosialisasi dan Komunikasi**

Diperlukan sosialisasi yang lebih efektif untuk memastikan seluruh penerima memahami mekanisme program, termasuk prosedur pengambilan bantuan dan kebijakan baru.

2. **Penguatan Pengawasan**

Pengawasan lebih ketat terhadap kualitas barang dan mekanisme distribusi diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap program.

3. **Optimalisasi Pendataan**

Pelibatan lebih aktif dari perangkat lokal seperti RT/RW dalam pendataan penerima manfaat untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.

4. **Evaluasi Berkala**

Disarankan untuk melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program guna mengidentifikasi kendala yang muncul dan menyusun solusi yang lebih efektif.

5. **Peningkatan Anggaran dan Cakupan**

Pemerintah dapat mempertimbangkan peningkatan anggaran program serta cakupan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara lebih memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik 2024, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024, No. 50/07/Th. XXVII, BPS, Jakarta
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2020). Banyaknya Penduduk dan Kepala Keluarga (KK) Menurut Kecamatan di Kota Surabaya Tahun 2019. <https://surabayakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/ODgwIzE=/banyaknya-penduduk-dan-kepala-keluarga-kk-menurut-kecamatan-di-kota-surabaya-tahun-2019.html>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2021). Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.

As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal

Volume 4 Nomor 1 (2025) 156 – 163 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v4i1.387

Pemerintah Kota Surabaya. (2008). Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.

Ramadhani, N. (2018). Strategi Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau Dalam Mengembangkan Kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Universitas Islam Riau.